

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga pada saat ini kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja disusun untuk memberikan gambaran arah kebijakan, tujuan, sasaran dan program kerja serta kegiatan organisasi yang akan dicapai dalam periode penganggaran satu tahun.

Kami menyadari dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2023 ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu diperlukan masukan dan saran dari semua pihak terkait guna penyempurnaan penyusunan Renja pada periode berikutnya.

Pemalang, Oktober 2022

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pemalang
Sekretaris,



JOKO NGATMO, SE, M.Si
NIP. 19680825 199303 1 004

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2023 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

Pemalang, Oktober 2022

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pemalang
Sekretaris,



JOKO NGATMO, SE, M.Si
NIP. 19680825 199303 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Tupoksi PD	34
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi PD	34
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	36
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	53
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	54
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	54
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	58
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	61
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	62
BAB V PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 Dan Pencapaian RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika s/d Tahun 2022	17
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang	34
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Pemalang	37
Tabel 2.4	Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kegiatan Masyarakat Tahun 2023	53
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2023	59
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023	63

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Perencanaan Pembangunan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang bertujuan agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun dengan memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja SKPD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja (PD) dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renja dan Dokumen Perencanaan lainnya



Dengan demikian Renja (PD) pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra (PD) dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja (PD) dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam laporan kinerja yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Visi pembangunan Kabupaten Pemalang yang dituangkan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021- 2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”** yang selanjutnya dijabarkan dalam 6 (enam) misi yaitu :

1. Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong;
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika sejalan dengan **misi 2 (dua)** Kabupaten Pemalang yaitu “ *Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.*”

Pengembangan sumber daya manusia berkualitas menuju Pemalang yang sejahtera merupakan tema pembangunan yang diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi 2 yaitu “ Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”. Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada:

1. Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan partisipasi, efektivitas, akuntabilitas,transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pemantapan kualitas aparatur melalui kelembagaan budaya kerja yang professional, bersih, beretika dan berwibawa.
3. Pemantapan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada seluruh bidang pelayanan.
4. Pemantapan kualitas aparatur yang baik, bersih, beretika, dan berwibawa melalui peningkatan responsivitas aparatur dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik.
5. Pemantapan sistem demokrasi dan politik serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip transparansi, keadilan dan HAM.

6. Pemantapan kelembagaan lokal yang berbasis jati diri budaya masyarakat Kabupaten Pemalang dalam mengantisipasi kemajuan dan pengaruh globalisasi.
7. Pemantapan kerjasama dan kemitraan strategis pada seluruh sektor pembangunan dalam rangka mendukung kemandirian daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2023, berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005– 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 96 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 101);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2018-2038;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pematang Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Pematang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pematang Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Diskominfo adalah dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang dalam penyelenggaraan komunikasi dan informasi daerah.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang bertujuan :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023;
2. Menyediakan sarana pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Diskominfo tahun 2023 memuat tujuan, strategi, kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang dalam mengemban visi misi Pembangunan Kabupaten Pematang.

Sistematika penulisan Renja meliputi 5 (lima) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Hasil Evaluasi SAKIP
- 2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan Daerah
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun 2021 dan Capaian Renstra Diskominfo

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang. Kegiatan review hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tahun 2021 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat diketahui melalui laporan kinerja dan laporan keuangan.

Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang menjelaskan tentang realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Evaluasi kinerja diperoleh berdasarkan hasil manfaat input dan output Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tahun 2021. Input dalam pengertian ini adalah nilai anggaran yang digunakan untuk menghasilkan output, sedangkan output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan.

Pada Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang melaksanakan 5 (lima) program, 12 kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan dengan anggaran yang diperoleh Dinas Komunikasi dan Informatika dari APBD Kabupaten Pemalang yaitu sebesar Rp. 17.694.884.000,- (tujuh belas milyar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.351.252.754,- (tujuh belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu

tujuh ratus lima puluh empat rupiah) atau capaian realisasi sebesar 97,62 %.

Adapun pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

- Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 49.581.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) realisasi sebesar Rp. 47.134.000,- (empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) atau 95,06%.
- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, memiliki anggaran sebesar Rp. 16.040.000,- (enam belas juta empat puluh ribu rupiah) dan terealisasi Rp. 15.230.000,- (lima belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau 94,95%.
- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, anggaran Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan realisasi Rp. 12.300.000,- atau 100%.
- Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 159.348.000,- (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) terealisasi Rp. 155.285.000,- (seratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau 97,45%.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :

- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 5.032.250.000,- (lima milyar tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 4.848.497.689,- (empat milyar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau 96,35%.
- Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, anggaran sebesar Rp. 40.900.000,- (empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 40.850.000,- (empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau 99,88%.

- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, anggaran Rp. 3.605.000,- (tiga juta enam ratus lima ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 3.605.000,- (tiga juta enam ratus lima ribu rupiah) atau 100%.
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 26.744.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 26.503.000,- (dua puluh enam juta lima ratus tiga ribu rupiah) atau 99,10%.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah :
- Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terealisasi sebesar Rp. 9.198.000,- (Sembilan juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau 91,98%.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
- Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya, memiliki anggaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terealisasi sebesar Rp. 2.323.500,- (dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) atau 77,45%.
 - Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terealisasi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau 100%.
 - Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, memiliki anggaran Rp. 0 dan realisasi 0% dikarenakan adanya *refocusing* anggaran.
 - Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, memiliki anggaran sebesar Rp. 183.866.000,- (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 182.989.323,- (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) atau 99,52%.
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :
- Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terealisasi sebesar Rp. 79.999.600,- (

tujuh puluh Sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) atau 100%.

- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran Rp. 33.757.600,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 33.699.500,- (tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau 99,83%.
- Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran Rp. 155.325.000,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 155.258.296,- (seratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau 99,96%.
- Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 122.013.000,- (seratus dua puluh dua juta tiga belas ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 122.013.000,- (seratus dua puluh dua juta tiga belas ribu rupiah) atau 100%.
- Sub kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, anggaran sebesar Rp. 13.150.000,- (tiga belas juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 13.150.000,- (tiga belas juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) atau 100%.
- Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material, anggaran sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) atau 100%.
- Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, anggaran Rp. 20.130.000,- (dua puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan realisasi Rp. 20.125.000,- (dua puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) atau 99,98%.
- Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 58.950.500,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 50.998.430,- (lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) atau 86,51%.

- Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, memiliki anggaran Rp. 0 dan realisasi 0% dikarenakan *refocusing* anggaran.
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
- Sub kegiatan Pengadaan Mebel, anggaran sebesar Rp. 11.303.000,- (sebelas juta tiga ratus tiga ribu rupiah) dan terealisasi Rp. 11.250.000,-(sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 99,50%.
 - Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, memiliki anggaran sebesar Rp. 110.474.000,- (seratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 110.300.300,- (seratus sepuluh juta tiga ratus ribu tiga ratus rupiah) atau 99,84%.
 - Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, anggaran sebesar Rp. 147.386.400,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 147.349.100,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu seratus rupiah) atau 99,97%.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
- Sub kegiatan Jasa Surat Menyurat, anggaran sebesar Rp. 97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 78.160.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) atau 80,58%.
 - Sub kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp. 286.602.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua ribu rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 266.251.460,- (dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu empat ratus enam puluh rupiah) atau 92,90%.
 - Sub kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 34.981.000,- (tiga puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) atau 99,95%.

- Sub kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor, anggaran Rp. 170.211.200,- (seratus tujuh puluh juta dua ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) dan anggaran terealisasi sebesar Rp. 134.303.473,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau 78,90%.
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
- Sub kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, anggaran Rp. 258.100.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dan realisasi Rp. 250.906.800,- (dua ratus lima puluh juta Sembilan ratus enam ribu delapan ratus rupiah) atau 97,21%.
 - Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel, anggaran Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan realisasi Rp. 14.991.000,- (empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) atau 99,94%.
 - Sub kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya, anggaran Rp. 67.280.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan realisasi Rp. 67.104.400,- (enam puluh tujuh juta seratus empat ribu empat ratus rupiah) atau 99,74%.
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, anggaran Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan realisasi Rp. 199.917.478,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau 99,96%.
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, anggaran Rp. 94.940.000,- (Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan terealisasi Rp. 94.053.650,- (Sembilan puluh empat juta lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau 99,07%.
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
- a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :
- Sub kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, anggaran Rp. 60.790.000,- (enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu

rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 57.757.400,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) atau 95,01%.

- Sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, anggaran Rp. 570.378.000,- (lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan realisasi Rp. 564.611.746,- (lima ratus enam puluh empat juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) atau 98,99%.
- Sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, anggaran Rp. 1.011.598.000,- (satu milyar sebelas juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan terealisasi Rp. 1.005.160.500,- (satu milyar lima juta seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) atau 99,36%.
- Sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik, anggaran Rp. 202.585.000,- (dua ratus dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan realisasi Rp. 198.641.610,- (seratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah) atau 98,05%.
- Sub kegiatan Layanan Hubungan Media, anggaran Rp. 1.119.595.000,- (satu milyar seratus Sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan realisasi Rp. 1.111.046.326,- (satu milyar seratus sebelas juta empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) atau 99,24%.
- Sub kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dengan anggaran sebesar Rp. 239.896.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dan realisasi Rp. 239.214.157,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus empat belas ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) atau 99,72%.
- Sub kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, anggaran sebesar Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 95.390.100,- (Sembilan puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh ribu seratus rupiah) atau 99,36%.
- Sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi, anggaran Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan realisasi Rp.

54.442.500,- (lima puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau 98,99%.

- Sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas, anggaran Rp. 251.302.000,- (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua ribu rupiah) dan realisasi Rp. 250.369.458,- (dua ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) atau 99,63%.
- Sub kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 194.870.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan realisasi Rp. 194.870.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau 100%.

3. Program Aplikasi Informatika

a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

- Sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, anggaran sebesar Rp. 4.185.500.000,- (empat milyar seratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan realisasi Rp. 4.176.409.361,- (empat milyar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus Sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) atau 99,78%.

b. Kegiatan Pengelolaan *e-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

- Sub kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan *e-government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 139.143.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan realisasi Rp. 138.867.535,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau 99,80%.
- Sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, anggaran sebesar Rp. 602.400.000,- (enam ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) dan realisasi Rp.

595.338.500,- (lima ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau 98,83%.

- Sub kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, anggaran Rp. 244.824.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan realisasi Rp. 244.241.636,- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) atau 99,76%.
- Sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, anggaran Rp. 78.806.000,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam ribu rupiah) dan realisasi Rp. 78.656.000,- (tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau 99,81%.
- Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas, anggaran Rp. 509.520.000,- (lima ratus Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan realisasi Rp. 508.718.330,- (lima ratus delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) atau 99,84%.
- Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, anggaran Rp. 111.619.000,- (seratus sebelas juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan realisasi Rp. 111.608.579,- (seratus sebelas juta enam ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) atau 99,99%.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota :

- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, anggaran Rp. 26.241.000,- (dua puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan realisasi Rp. 23.894.250,- (dua puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau 91,06%.
- Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi, anggaran Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)

dan realisasi Rp. 43.310.500,- (empat puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) atau 90,23%.

- Sub kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral, anggaran Rp. 82.443.000,- (delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 80.507.267,- (delapan puluh juta lima ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) atau 97,65%.

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

- Sub kegiatan Pelaksanaan Kemanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, anggaran Rp. 129.354.000,- (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan realisasi Rp. 128.919.100,- (seratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu seratus rupiah) atau 99,66%.
- Sub kegiatan Penyediaan Layanan Kemanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, anggaran Rp. 65.762.900,- (enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dan realisasi Rp. 65.549.900,- (enam puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) atau 99,68%.

Tabel. 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Diskominfo dan Pencapaian Renstra Diskominfo s/d Tahun 2022 Kabupaten Pematang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
		Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
		Persentase administrasi kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
		Persentase penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	80%
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	80%
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	80%
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	11 dokumen	11 dokumen	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen penatausahaan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/bulan	41 orang/bulan	41 orang/bulan	41 orang/bulan	100%	40 orang/bulan	40 orang/bulan	80%
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	100%	2000 dokumen dan 150 dokumen	2000 dokumen dan 150 dokumen	80%
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	80%
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen, 4 dokumen, 1 dokumen	12 dokumen, 4 dokumen, 1 dokumen	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya bimbingan teknis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Bintek	1 bimtek	1 Bintek	1 bimtek	100%	20 orang	20 orang	80%
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
		Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	100%	8 jenis	8 jenis	80%
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 jenis	25 jenis	25 jenis	25 jenis	100%	15 jenis	15 jenis	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6.930 dus	6.930 dus	6.930 dus	6.930 dus	100%	6930 snak dan makan	6930 snak dan makan	80%
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	152 buah	152 buah	152 buah	152 buah	100%	10 jenis	10 jenis	80%
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 surat kabar	12 surat kabar	12 surat kabar	12 surat kabar	100%	55 buku, 12 bulan	55 buku, 12 bulan	80%
2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	11.971 buah	11.971 buah	11.971 buah	11.971 buah	100%	20 jenis	20 jenis	80%
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 cinderamata	30 cinderamata	30 cinderamata 165 Orang	30 cinderamata 165 Orang	100%	30 cinderamata, 200 orang	30 cinderamata, 200 orang	80%
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Kali	10 Kali	10 Kali	10 Kali	100%	30 dokumen	30 dokumen	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pengadaan barang dan jasa BMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 unit	28 unit	32 unit/ 7 jenis	32 unit/ 7 jenis	100%	2 unit	2 unit	80%
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500 surat	2500 surat	5000 Surat	5000 Surat	100%	5000 surat	5000 surat	80%
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	80%
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 unit	45 unit	48 unit/ 5 jenis	48 unit/ 5 jenis	100%	50 unit	50 unit	80%
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 jenis	20 jenis	23 jenis	23 jenis	100%	55 orang	55 orang	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit kendaran roda 2 dan 10 unit kendaran roda 4	14 unit kendaran roda 2 dan 10 unit kendaran roda 4	14 unit kendaran roda 2 dan 10 unit kendaran roda 4	14 unit kendaran roda 2 dan 10 unit kendaran roda 4	100%	23 unit	23 unit	80%
2.16.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 unit/4 jenis	6 unit/4 jenis	6 unit/4 jenis	6 unit/4 jenis	100%	10 jenis	10 jenis	80%
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	100%	8 unit	8 unit	80%
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	4 gedung	4 gedung	4 gedung	4 gedung	100%	4 gedung	4 gedung	80%
2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 gedung	4 gedung	4 gedung	4 gedung	100%	5 gedung	5 gedung	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Ketersediaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
		Proporsi penduduk yang mengakses informasi publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan informasi dan komunikasi publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
		Tersedianya layanan publik yang diselenggarakan secara online	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
		Tersedianya informasi pemerintah daerah secara online	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
		Terselenggaranya hubungan masyarakat, media, kemitraan komunitas dan kemitraan dengan pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	3	3	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	80%
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	dokumen	dokumen	400 buah	400 buah	100%	1800 dokumen	1800 dokumen	80%
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	400 buah	400 buah	3500 eksemplar	3500 eksemplar	100%	4 dokumen	4 dokumen	80%
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3500 eksemplar	3500 eksemplar	30 jenis	30 jenis	100%	6 dokumen	6 dokumen	80%
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	13 kegiatan	13 kegiatan	13 kegiatan	13 kegiatan	100%	7 layanan	7 layanan	80%
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 dokumen	1 dokumen	80%
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 kegiatan	1 kegiatan	80 peserta	80 peserta	100%	100 orang	100 orang	80%
2.16.02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 dokumen	1 dokumen	80%
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100%	1 unit, 8 unit, 21 meter, 1 unit, 2 unit	1 unit, 8 unit, 21 meter, 1 unit, 2 unit	80%
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Network terintegrasi (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkoneksinya perangkat daerah dengan jaringan intra pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Tersedianya akses internet bagi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	100%	67 unit, 12 bulan, 5 desa	67 unit, 12 bulan, 5 desa	80%
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah daerah (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
		Tersedianya layanan SPBE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
		Terselenggaranya smart city	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata kelola	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	80%
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	12 bulan, 1 dokumen	12 bulan, 1 dokumen	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik	3 Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100%	1 unit aplikasi	1 unit aplikasi	80%
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	1 website	1 website	80%
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	1 dokumen, 3 kegiatan, 1 paket	1 dokumen, 3 kegiatan, 1 paket	80%
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	2 unit	2 unit	0	0	0%	2 unit	2 unit	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase statistik sektoral yang tersedia sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya buku DDA (Daerah Dalam Angka)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Tersusunnya buku KCA (Kecamatan Dalam Angka)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
		Tersusunnya buku Info Grafis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik sektoral	4 dokumen	4 dokumen	0	0	0%	4 dokumen	4 dokumen	80%
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dengan peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	50 orang	50 orang	1 Bintek (50 orang)	1 Bintek (50 orang)	100%	50 orang	50 orang	80%
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah dokumen metadata statistik sektoral	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase konten informasi yang telah diamankan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
		Tingkat keamanan informasi pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya kegiatan strategis yang diamankan dengan kegiatan pengamanan sinyal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
		Tersusunnya sistem elektronik yang menerapkan prinsip-prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
		Tersedianya sistem informasi yang telah diaudit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
		Tersusunnya titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah fasilitasi kemanan informasi pemerintah daerah berbasis leketronik dan non elektronik	3 sistem	3 sistem	3 sistem	3 sistem	100%	48 laporan	48 laporan	80%
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kemanan informasi pemerintah daerah yang tersedia	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	3 unit	3 unit	80%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 Indikator Kinerja Utama Diskominfo sebagai berikut :

Tabel 2. 2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfo Kabupaten Pemalang

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Indeks SPBE	indeks				3,34	3,35	3,36	3,37	3,34	3,35	3,36	3,37	
	Persentase Network Terintegrasi	%				74	78	82	88	74	78	82	88	
	Tingkat/Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI).	indeks				2,2	2,3	2,4	2,5	2,2	2,3	2,4	2,5	
	Indeks/nilai Keterbukaan Informasi Publik	indeks				75	76	77	78	75	76	77	78	
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	%				1%	2%	4%	5%	1%	2%	4%	5%	
	Persentase Penduduk yang terpapar informasi publik	%				25	35	45	55	25	35	45	55	
	IKM Layanan Komunikasi dan Informatika	%				75	77,5	80	82,5	75	77,5	80	82,5	

Berdasarkan indikator tahun 2021 capaian perencanaan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah sesuai target.

2.3 Hasil Evaluasi SAKIP

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Diskominfo Tahun 2021 maka diperoleh rekomendasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dan memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam Renstra dan Renja Tahunan Diskominfo;
2. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja;
3. Meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam LKjIP;
4. Meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan melakukan pemantauan pencapaian kinerja atas program/kegiatan dan rencana aksi.

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfo

Analisis terhadap faktor internal berupa potensi dan permasalahan, maupun eksternal berupa peluang dan ancaman diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1. Faktor Internal

a. Potensi

- 1) Memiliki ASN yang berlatarbelakang kompetensi Informatika (IT);
- 2) Tersedianya Fungsional Pranata Komputer, analisis hubungan masyarakat, sandiman dan statistisi;
- 3) Adanya Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
- 4) Adanya fungsi koordinasi dan kerjasama untuk mendukung fungsi organisasi.

b. Permasalahan

- 1) Keterbatasan jumlah ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Siantar;
- 2) Masih rendahnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (statistik, sektoral dan spasial) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
- 3) Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi, komunikasi vertikal dan horisontal dalam rangka penyusunan dokumen informasi dan komunikasi;
- 4) Belum semua sistem aplikasi pemerintah daerah terintegrasi / masih terdapat aplikasi pemerintah daerah yang belum terintegrasi;
- 5) Sarana ruangan yang standar keamanan informasi yang belum memadai;
- 6) Jaringan Internet yang belum merata di Kabupaten Pematang Siantar.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

1. Tersedianya dukungan teknologi informasi dalam menjalankan fungsi organisasi;
2. Adanya peluang peningkatan kompetensi ASN di bidang informasi dan komunikasi, melalui pengembangan jabatan fungsional dan diklat teknis;
3. Adanya kebijakan-kebijakan nasional dan provinsi yang berkontribusi dalam pencapaian target informasi dan komunikasi, serta program-program strategis lainnya.

b. Ancaman

- 1) Perubahan regulasi di bidang perencanaan dan penganggaran terkait

urusan komunikasi dan informatika daerah, namun belum disertai petunjuk teknis yang operatif dan sistem informasi yang aplikatif serta minimnya sosialisasi;

- 2) Tuntutan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik sehingga kinerja organisasi dituntut transparansi dan akuntabel;
- 3) Kemudahan akses informasi dan komunikasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

Berdasarkan identifikasi faktor internal dan eksternal di atas, pada pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pengampu urusan komunikasi dan informatika di daerah menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme urusan komunikasi dan informatika;
2. Akses jaringan internet yang belum merata;
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data secara sistematis dan akurat;
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program komunikasi dan informatika dalam upaya perbaikan pembangunan daerah;
5. Sinergitas pelaksanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah kurang optimal;
6. Masih kurangnya SDM yang memiliki *skill* dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya.

2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pematang Siantar Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Siantar melaksanakan 4 (empat) Program yang terdiri dari:

1. Program rutin urusan penunjang, yaitu:
 - 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
2. Program Urusan Pemerintahan Bidang Informasi dan Komunikasi :
 - 1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
 - 2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
3. Program Urusan Pemerintahan Bidang Statistik :
 - 1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
4. Program Urusan Pemerintahan Bidang Persandian :
 - 1) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Tabel. 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Pemalang

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar					Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar					
Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika				Rp. 16.154.900.000	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika				Rp.16.154.900.000	
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			100%	Rp. 8.757.197.000	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			100%	Rp. 8.757.197.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Rp. 242.042.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Rp. 242.042.000	
		Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan	100%				Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan	100%		
		Persentase administrasi kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	100%				Persentase administrasi kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	100%		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%				Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	12 dokumen	Rp. 58.386.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	12 dokumen	Rp. 58.386.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan perangkat daerah (RKA)	4 dokumen	Rp. 17.950.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Diskominfo	Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan perangkat daerah (RKA)	4 dokumen	Rp. 17.950.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan perangkat daerah (DPA)	4 dokumen	Rp. 14.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Diskominfo	Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan perangkat daerah (DPA)	4 dokumen	Rp. 14.500.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (LKPJ, SAKIP, LPPD, RKPD)	11 dokumen	Rp. 151.206.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Diskominfo	Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan perangkat daerah (DPA)	4 dokumen	Rp. 14.500.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen penatausahaan keuangan	100%	Rp. 5.588.555.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen penatausahaan keuangan	100%	Rp. 5.588.555.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pemalang	Jumlah gaji dan tunjangan pegawai	40 orang/bulan	Rp. 5.544.372.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	Jumlah gaji dan tunjangan pegawai	40 orang/bulan	Rp. 5.544.372.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen penatusahaan keuangan SKPD	2000 dokumen dan 150 dokumen	Rp. 10.535.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Diskominfo	Jumlah dokumen penatusahaan keuangan SKPD	2000 dokumen dan 150 dokumen	Rp. 10.535.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	Rp. 2.940.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskominfo	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	Rp. 2.940.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan /triwulan/semes teran	12 dokumen, 4 dokumen, 1 dokumen	Rp. 30.708.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Diskominfo	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan /triwulan/semesteran	12 dokumen, 4 dokumen, 1 dokumen	Rp. 30.708.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terselenggaranya bimbingan teknis	100%	Rp. 136.158.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskominfo	Terselenggaranya bimbingan teknis	100%	Rp. 136.158.500	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kabupaten Pemalang	Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang- undangan	20 orang	Rp. 136.158.500	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Diskominfo	Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	20 orang	Rp. 136.158.500	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Rp. 573.708.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Rp. 573.708.500	
		Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%				Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pemalang	Jumlah peralatan listrik yang terbeli	8 jenis	Rp. 41.900.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo	Jumlah peralatan listrik yang terbeli	8 jenis	Rp. 41.900.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pemalang	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	15 jenis	Rp. 26.494.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Diskominfo	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	15 jenis	Rp. 26.494.500	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Pemalang	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	6930 snak dan makan	Rp. 147.800.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskominfo	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	6930 snak dan makan	Rp. 147.800.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Pemalang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	Rp. 62.060.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Diskominfo	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	Rp. 62.060.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Pemalang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	55 buku, 12 bulan	Rp. 28.450.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Diskominfo	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	55 buku, 12 bulan	Rp. 28.450.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
Penyediaan Bahan/Material	Kabupaten Pemalang	Jumlah bahan/material ATK	20 jenis	Rp. 75.148.000	Penyediaan Bahan/Material	Diskominfo	Jumlah bahan/material ATK	20 jenis	Rp. 75.148.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Pemalang	Jumlah fasilitasi tamu berkunjung	30 cinderamata, 200 orang	Rp. 22.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Diskominfo	Jumlah fasilitasi tamu berkunjung	30 cinderamata, 200 orang	Rp. 22.500.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen hasil rapat	30 dokumen	Rp. 169.356.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	Jumlah dokumen hasil rapat	30 dokumen	Rp. 169.356.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya pengadaan barang dan jasa BMD	100%	Rp. 20.880.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya pengadaan barang dan jasa BMD	100%	Rp. 20.880.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pemalang	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	2 unit	20.880.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	2 unit	20.880.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	Rp. 1.687.044.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	Rp. 1.687.044.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Pemalang	Jumlah surat masuk dan keluar	5000 surat	Rp. 45.122.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskominfo	Jumlah surat masuk dan keluar	5000 surat	Rp. 45.122.500	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pemalang	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	12 bulan	Rp. 372.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	12 bulan	Rp. 372.600.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pemalang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	50 unit	Rp. 50.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfo	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	50 unit	Rp. 50.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Pemalang	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi	55 orang	Rp. 1.219.321.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfo	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi	55 orang	Rp. 1.219.321.500	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	Rp. 508.809.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	Rp. 508.809.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Pemalang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang terbayarkan pajaknya	23 unit	Rp. 204.250.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskominfo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang terbayarkan pajaknya	23 unit	Rp. 204.250.000	
Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Pemalang	Jumlah mebel yang dipelihara	10 jenis	Rp. 25.000.000	Pemeliharaan Mebel	Diskominfo	Jumlah mebel yang dipelihara	10 jenis	Rp. 25.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pemalang	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	8 unit	Rp. 74.526.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	8 unit	Rp. 74.526.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Pemalang	Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang terpelihara	4 gedung	Rp. 125.033.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang terpelihara	4 gedung	Rp. 125.033.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Pemalang	Jumlah sarana prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	5 gedung	Rp. 80.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah sarana prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	5 gedung	Rp. 80.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase Ketersediaan Informasi Publik	100%	Rp. 2.235.775.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase Ketersediaan Informasi Publik	100%	Rp. 2.235.775.000	
		Proporsi penduduk yang mengakses informasi publik	100%				Proporsi penduduk yang mengakses informasi publik	100%		
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%				Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	100%				Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	100%		
		Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%				Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%		
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%				Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya layanan informasi dan komunikasi publik	100%	Rp. 2.235.775.000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya layanan informasi dan komunikasi publik			
		Tersedianya layanan publik yang diselenggarakan secara online	100%				Tersedianya layanan publik yang diselenggarakan secara online			
		Tersedianya informasi pemerintah daerah secara online	100%				Tersedianya informasi pemerintah daerah secara online			
		Terselenggaranya hubungan masyarakat, media, kemitraan komunitas dan kemitraan dengan pemangku kepentingan	100%				Terselenggaranya hubungan masyarakat, media, kemitraan komunitas dan kemitraan dengan pemangku kepentingan			

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen hasil monitoring dan aspirasi publik	3 dokumen	Rp. 70.000.000	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten pemalang	Jumlah dokumen hasil monitoring dan aspirasi publik	3 dokumen	Rp. 70.000.000	
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Pemalang	Jumlah produksi dan publikasi konten melalui website dan media sosial	1800 dokumen	Rp. 324.100.000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten pemalang	Jumlah produksi dan publikasi konten melalui website dan media sosial	1800 dokumen	Rp. 324.100.000	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Pemalang	Jumlah media komunikasi publik	4 dokumen	Rp. 436.844.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten pemalang	Jumlah media komunikasi publik	4 dokumen	Rp. 436.844.000	
Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten Pemalang	Jumlah pelayanan informasi publik	6 dokumen	Rp. 160.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten pemalang	Jumlah pelayanan informasi publik	6 dokumen	Rp. 160.000.000	
Layanan Hubungan Media	Kabupaten Pemalang	Jumlah layanan hubungan media	7 layanan	Rp. 743.816.000	Layanan Hubungan Media	Kabupaten pemalang	Jumlah layanan hubungan media	7 layanan	Rp. 743.816.000	
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kabupaten Pemalang	Jumlah penyelenggaraan kemitraan dengan pemangku kepentingan	1 dokumen	Rp. 130.000.000	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kabupaten pemalang	Jumlah penyelenggaraan kemitraan dengan pemangku kepentingan	1 dokumen	Rp. 130.000.000	
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kabupaten Pemalang	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	100 orang	Rp. 100.000.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kabupaten pemalang	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	100 orang	Rp. 100.000.000	
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah fasilitasi komisi informasi daerah	1 dokumen	Rp. 40.000.000	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kabupaten pemalang	Jumlah fasilitasi komisi informasi daerah	1 dokumen	Rp. 40.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten Pemalang	Jumlah penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	dokumen	Rp. 150.000.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten pemalang	Jumlah penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	dokumen	Rp. 150.000.000	
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik	1 unit, 8 unit, 21 meter, 1 unit, 2 unit	Rp. 81.015.000	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten pemalang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik	1 unit, 8 unit, 21 meter, 1 unit, 2 unit	Rp. 81.015.000	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase Network terintegrasi	100%	Rp. 5.161.928.000	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase Network terintegrasi	100%	Rp. 5.161.928.000	
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terkoneksinya perangkat daerah dengan jaringan intra pemerintah daerah	100%	Rp. 4.453.975.000	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terkoneksinya perangkat daerah dengan jaringan intra pemerintah daerah	100%	Rp. 4.453.975.000	
		Tersedianya akses internet bagi perangkat daerah	100%				Tersedianya akses internet bagi perangkat daerah	100%		
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	67 unit, 12 bulan, 5 desa	Rp. 4.453.975.000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 sekitar majakerta dan 4 blankspot	Jumlah penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	67 unit, 12 bulan, 5 desa	Rp. 4.453.975.000	
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah daerah (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	100%	Rp. 707.953.000	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah daerah (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra	100%	Rp. 707.953.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Tersedianya layanan SPBE	100%				Tersedianya layanan SPBE	100%		
		Terselenggaranya smart city	100%				Terselenggaranya smart city	100%		
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pematang	Jumlah dokumen tata kelola	1 dokumen	Rp. 134.950.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pematang	Jumlah dokumen tata kelola	1 dokumen	Rp. 134.950.000	
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Pematang	Jumlah penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	12 bulan, 1 dokumen	Rp. 62.925.000	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Pematang	Jumlah penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	12 bulan, 1 dokumen	Rp. 62.925.000	
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten Pematang	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik	1 unit aplikasi	Rp. 74.600.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten Pematang	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik	1 unit aplikasi	Rp. 74.600.000	
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kabupaten Pematang	Jumlah penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah	1 website	Rp. 71.950.000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kabupaten Pematang	Jumlah penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah	1 website	Rp. 71.950.000	
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kabupaten Pematang	Jumlah pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas	1 dokumen, 3 kegiatan, 1 paket	Rp. 216.700.000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kabupaten Pematang	Jumlah pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas	1 dokumen, 3 kegiatan, 1 paket	Rp. 216.700.000	
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Pematang	Jumlah pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	2 unit	Rp. 146.828.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Pematang	Jumlah pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	2 unit	Rp. 146.828.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase statistik sektoral yang tersedia sesuai standar	100%	Rp. 218.575.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase statistik sektoral yang tersedia sesuai standar	100%	Rp. 218.575.000	
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%		
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%		
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Tersusunnya buku DDA (Daerah Dalam Angka)	100%	Rp. 218.575.000			Tersusunnya buku DDA (Daerah Dalam Angka)	100%	Rp. 218.575.000	
		Tersusunnya buku KCA (Kecamatan Dalam Angka)	100%				Tersusunnya buku KCA (Kecamatan Dalam Angka)	100%		
		Tersusunnya buku Info Grafis	100%				Tersusunnya buku Info Grafis	100%		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik sektoral	4 dokumen	Rp. 100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik sektoral	4 dokumen	Rp. 100.000.000	
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kabupaten Pemalang	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dengan peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	50 orang	Rp. 40.000.000	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kabupaten Pemalang	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dengan peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	50 orang	Rp. 40.000.000	
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen metadata statistik sektoral	3 dokumen	Rp. 78.575.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen metadata statistik sektoral	3 dokumen	Rp. 78.575.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase konten informasi yang telah diamankan	100%		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase konten informasi yang telah diamankan	100%		
		Tingkat keamanan informasi pemerintah	100%				Tingkat keamanan informasi pemerintah	100%		
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Tersusunnya kegiatan strategis yang diamankan dengan kegiatan pengamanan sinyal	100%		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Tersusunnya kegiatan strategis yang diamankan dengan kegiatan pengamanan sinyal	100%		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Tersusunnya sistem elektronik yang menerapkan prinsip-prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi	100%				Tersusunnya sistem elektronik yang menerapkan prinsip-prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi	100%		
		Tersedianya sistem informasi yang telah diaudit	100%				Tersedianya sistem informasi yang telah diaudit	100%		
		Tersusunnya titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	100%				Tersusunnya titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	100%		
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Pematang	Jumlah fasilitasi kewanaman informasi pemerintah daerah berbasis leketronik dan non elektronik	48 laporan	Rp. 119.176.400	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Pematang	Jumlah fasilitasi kewanaman informasi pemerintah daerah berbasis leketronik dan non elektronik	48 laporan	Rp. 119.176.400	
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pematang	Jumlah layanan informasi pemerintah daerah yang tersedia	3 unit	Rp. 62.248.600	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pematang	Jumlah layanan kewanaman informasi pemerintah daerah yang tersedia	3 unit	Rp. 62.248.600	

II.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam menyusun RKPD, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang. Selain itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah melalui perencanaan pembangunan daerah yaitu Musrenbang pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan Nasional. Melalui Musrenbang diharapkan dapat mensinkronkan dan merekonsiliasikan pendekatan top down dan bottom up.

Adapun usulan yang ditujukan kepada Diskominfo Kabupaten pemalang yaitu :

Tabel. 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan (Ranking)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Desa Botekan	Pelatihan IT untuk masyarakat umum	30 Orang	Musrenbang Kecamatan

Pelatihan IT (Informasi Teknologi) merupakan usulan Musrenbang Kecamatan yang ditujukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang yang ditujukan untuk masyarakat umum, melalui program kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dengan mengusung tema **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, dengan fokus arah kebijakan prioritas RKP Tahun 2023 yaitu :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas;
6. Ekonomi hijau;
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ditujukan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada :

- a) Pemantapan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- b) Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;
- c) Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin berdikari;
- d) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan kondusivitas wilayah;
- e) Pemantapan kapasitas fiskal daerah.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang yaitu :

a) Visi

Visi Kabupaten Pemalang tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”.

Penjelasan Visi :

Dalam visi tersebut di atas terdapat Empat gagasan pokok yang menjiwai seluruh gerak dan proses pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pematang Jaya, yaitu:

1. **Adil,**

Adil merupakan keadaan/kondisi Kabupaten Pematang Jaya dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

2. **Makmur**

Makmur merupakan kondisi Kabupaten Pematang Jaya yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.

3. **Agamis**

Agamis adalah kondisi Kabupaten Pematang Jaya yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.

4. **Ngangeni**

Ngangeni adalah kondisi Kabupaten Pematang Jaya yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pematang Jaya sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. *“Pematang Jaya itu ngangeni”*.

b) Misi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Bupati Pematang Jaya Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung keseluruhan Misi Kabupaten Pematang Jaya.

Pencapaian Visi **“Terwujudnya Kabupaten Pematang Jaya yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”** ditempuh melalui 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Misi pertama **Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Pematang Jaya yang masyarakatnya memiliki rasa aman, tenteram dan tertib dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Rasa aman yang dimiliki masyarakat meliputi aman dari:

- a. ancaman politik;

- b. ancaman bencana; dan
- c. ancaman ketertiban dan ketenteraman perlindungan masyarakat.

Bentuk dari ancaman politik antara lain Konflik SARA yang dikaitkan dengan politik; Pelanggaran HAM; isu politik. (catatan: konflik SARA dapat dikaitkan dengan kemunculannya pada saat Pemilu, Pilpres, Pilkada). Dekriminalisasi.

Ancaman bencana, meliputi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur.

2. Misi kedua **Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur yang memiliki integritas dan menjunjung tinggi budaya malu dan merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan, demokratis, transparan dan akuntabel. Birokrasi yang responsive dijalankan oleh aparatur yang memiliki mindset sebagai pelayan masyarakat, professional dengan sistem kerja yang terukur, memiliki etos kerja yang baik, kreatif, dan inovatif. Pemerintah harus mewujudkan pelayanan public yang prima dengan mengedepankan kemudahan akses dan transparansi

3. Misi ketiga **Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan karakter masyarakat Kabupaten Pemalang yang menerapkan nilai-nilai agama dalam laku hidup sehari-hari. Upaya tersebut dilakukan melalui internalisasi dan implementasi nilai-nilai agama, etika, budi pekerti, toleransi dan kecintaan pada budaya bangsa serta meneguhkan peran pondok pesantren dan lembaga pendidikan dalam membangun karakter masyarakat. Selain itu misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dalam hal pendidikan dan kesehatan serta mengurangi kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan jaminan dan perlindungan sosial kepada anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan.

4. Misi keempat **Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan perdesaan dan perkotaan. Kegiatan pembangunan perkotaan harus saling melengkapi dan saling terkait dengan wilayah perdesaan. Perubahan paradigma dalam pembangunan memandang desa sebagai basis potensial kegiatan ekonomi. Menjadikan desa sebagai pusat-pusat pembangunan dan motor utama penggerak roda perekonomian. Upaya

keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan ditempuh melalui percepatan, peningkatan kualitas pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta penataan kawasan perkotaan (Program Unggulan: DEDI, DESI)

5. Misi kelima **Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal. Potensi lokal Kabupaten Pemalang meliputi potensi pariwisata, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi kelautan/perikanan tangkap dan budidaya, potensi home industry, potensi ekonomi kreatif. Misi ini ditempuh melalui penguatan koperasi dan UMKM; ekonomi kreatif; peningkatan keahlian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan; penguatan sektor pariwisata; serta dukungan terhadap kemudahan berusaha/investasi untuk meningkatkan daya saing. (Program Unggulan: DEWI, KOIN)

6. Misi Keenam **Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan infrastruktur yang mantap dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dituntut untuk mampu mengimplementasikan Visi Pembangunan Pemalang 2021-2026, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika sejalan dengan **misi 2 (dua)** Kabupaten Pemalang yaitu “ *Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.*”

Pengembangan sumber daya manusia berkualitas menuju Pemalang yang sejahtera merupakan tema pembangunan yang diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi 2 yaitu “ Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”. Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada:

8. Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan partisipasi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Pemantapan kualitas aparatur melalui kelembagaan budaya kerja yang professional, bersih, beretika dan berwibawa.
10. Pemantapan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada seluruh bidang pelayanan.
11. Pemantapan kualitas aparatur yang baik, bersih, beretika, dan berwibawa melalui peningkatan responsivitas aparatr dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik.
12. Pemantapan sistem demokrasi dan politik serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip transparansi, keadilan dan HAM.

13. Pemantapan kelembagaan lokal yang berbasis jati diri budaya masyarakat Kabupaten Pemalang dalam mengantisipasi kemajuan dan pengaruh globalisasi.
14. Pemantapan kerjasama dan kemitraan strategis pada seluruh sektor pembangunan dalam rangka mendukung kemandirian daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Diskominfo

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun rencana program dengan formulasi tujuan berikut:

1. Digitalisasi tata kelola pemerintahan Kabupaten Pemalang
2. Peningkatan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi publik
3. Peningkatan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Sedangkan sasaran yang akan dituju dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengembangan dan pemanfaatan TIK menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2. Meningkatnya keamanan informasi untuk mendukung sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
3. Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral
4. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi publik.
5. Meningkatnya kualitas layanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Keterkaitan antara tujuan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dengan sasaran bisa tampak dalam tabel di bawah ini :

TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	Satuan	Tahun 2020	Target Indikator Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1`		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Pemalang	Indeks SPBE			Indeks	3,34	3,34	3,35	3,36	3,37	3,38	3,4
		Meningkatnya Pengembangan dan pemanfaatan TIK	Persentase Network Terintegrasi		70,73	74	78	82	88	90	90
		Meningkatnya keamanan informasi untuk mendukung SPBE	Tingkat/Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI).	Indeks	2	2,2	2,3	2,4	2,5	3	3
Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik	Indeks/nilai Keterbukaan Informasi Publik			Indeks/Nilai	74,83	75	76	77	78	79	80,2

		Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	Persen	0,5	1%	2%	4%	5%	8%	8%
		Meningkatnya kualitas Layanan Informasi dan komunikasi Publik	Persentase Penduduk yang terpapar informasi publik	Persen	17,2	25	35	45	55	65	65
			IKM Layanan Komunikasi dan Informatika	Indeks/Nilai	72,75	75	77,5	80	82,5	85	85
Peningkatan kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika		Meningkatnya kualitas layanan Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP	nilai	59,83	60	60,5	61	61,5	61,7	62
			Nilai RB	Nilai	47,80	48	48,25	48,55	49,05	49,5	50, 1

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Diskominfo Kabupaten Pemalang Tahun 2023 maka diperlukan rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Dalam merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya yaitu :

- a) Keserasian dan keterpaduan pembangunan Diskominfo dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021– 2026.
- b) Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan.

Secara garis besar program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Diskominfo Kabupaten Pemalang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 5 (lima) program yaitu : program penunjang urusan pemerintahan, program informasi dan komunikasi publik, program aplikasi informatika, program penyelenggaraan statistik sektoral, program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
2. Terdapat 12 (dua belas) kegiatan yaitu : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Terdapat 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan yang dilaksanakan oleh sekretariat dan 3 (tiga) bidang dengan kebutuhan dana atau anggaran pagu indikatif sebesar Rp. 16.554.900.000 (enam belas milyar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISKOMINFO KABUPATEN PEMALANG

4.1 Rencana Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Pemalang 2021-2026 dan untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Pemalang 2021-2026, yaitu “**Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni**” yang ditempuh melalui enam misi.

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2023 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

7/15/22, 1:42 AM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pemalang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	16						16,154,900,000						17,735,390,000		
2	16	01					8,757,197,000						9,632,916,700		
2	16	01	2.01				242,042,000						266,246,200		
2	16	01	2.01	01		0 Dokumen	58,386,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		0 Dokumen	64,224,600	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.01	02			17,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul			19,745,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.01	04			14,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul			15,950,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.01	07			151,206,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul			166,326,600	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.02				5,588,555,000						6,147,410,500		
2	16	01	2.02	01			5,544,372,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul			6,098,809,200	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.02	03			10,535,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul			11,588,500	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.02	05			2,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul			3,234,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.02	07			30,708,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul			33,778,800	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.05				136,158,500						149,774,350		
2	16	01	2.05	11			136,158,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul			149,774,350	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.06				573,708,500						631,079,350		
2	16	01	2.06	01			41,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;			46,090,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pemalang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						26,494,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;			29,143,950	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						147,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul			162,580,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						62,060,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul			68,266,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						28,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul			31,295,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material						75,148,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul			82,662,800	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						22,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul			24,750,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						169,356,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul			186,291,600	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						20,880,000							22,968,000	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul			22,968,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,687,044,000							1,855,748,400	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						45,122,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul			49,634,750	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						372,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul			409,860,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul			55,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1,219,321,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul			1,341,253,650	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						508,809,000							559,689,900	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pemalang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						204,250,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		224,675,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel						25,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		27,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						74,526,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		81,978,600	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						125,033,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;		137,536,300	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						80,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;		88,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						2,235,775,000							2,424,352,500	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						2,235,775,000							2,424,352,500	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik						70,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (DEDI);		77,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik						324,100,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (DEDI);		356,510,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik						436,844,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (DEDI);		480,528,400	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik						160,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (DEDI);		176,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pemalang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Nasional					Daerah		
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (DEDI);			818,197,600	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (DEDI);			143,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (DEDI);			110,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (DEDI);			44,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (DEDI);			130,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (DEDI);			89,116,500	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA											5,678,120,800	
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											4,899,372,500	
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (DEDI);			4,899,372,500	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											778,748,300	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pematang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Nasional	Daerah			
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						134,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (DEDI);		148,445,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah						62,925,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (DEDI);		69,217,500	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik						74,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (DEDI);		82,060,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah						71,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (DEDI);		79,145,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas						216,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (DEDI);		238,370,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah						146,828,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (DEDI);		161,510,800	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						218,575,000						240,432,500		
2.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						218,575,000						240,432,500		
2.20.02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						218,575,000						240,432,500		
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral						100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (DEDI);		110,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi						40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (DEDI);		44,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pematang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral						78,575,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (DEDI);		86,432,500	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						181,425,000						199,567,500		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						181,425,000						199,567,500		
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						181,425,000						199,567,500		
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						119,176,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (DEDI);		131,094,040	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						62,248,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (DEDI);		68,473,460	Dinas Komunikasi dan Informatika	
TOTAL							16,554,900,000						18,175,390,000		

BAB V

PENUTUP

Renja Diskominfo Kabupaten Pemalang Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Diskominfo dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Diskominfo yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Renja Diskominfo Kabupaten Pemalang selain sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Diskominfo Kabupaten Pemalang. Penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja Diskominfo Kabupaten Pemalang akan mengikuti petunjuk dan aturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.

V.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Diskominfo Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel maka disusun kaidah-kaidah pelaksanaannya, sebagai berikut :

- a. Diskominfo Kabupaten Pemalang berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan yang akan dirumuskan dalam Renja Diskominfo Tahun 2023 setelah diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
- b. Diskominfo Kabupaten Pemalang berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Renja Diskominfo Tahun 2023 dan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023.
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Diskominfo Kabupaten Pemalang Tahun 2023, Kepala Diskominfo Kabupaten Pemalang wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2023.
- d. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam kaidah pelaksanaan ini, dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V.2 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut disusunnya Renja Diskominfo Kabupaten Pemalang Tahun 2023 ini, maka:

- a. Dilakukan Koordinasi dan komunikasi dengan bidang terkait agar perencanaan program dan kegiatan Tahun 2023 dapat berjalan lancar.
- b. Dokumen ini digunakan sebagai dasar dan bahan pertimbangan dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan informasi dan komunikasi untuk periode selanjutnya.

Demikian yang dapat kami sampaikan, kami menyadari dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2023 ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu diperlukan masukan dan saran dari semua pihak terkait guna penyempurnaan penyusunan Renja pada periode berikutnya.

Pemalang, Oktober 2022

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pemalang
Sekretaris,



JOKO NGATMO, SE, M.Si
NIP. 19680825 199303 1 004